

DAMPAK KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK, TELEPON DAN TARIF DASAR LISTRIK TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Djoko Suseno

Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta Surakarta

ABSTRACT

In macro view, Indonesia experiences a better economic recovery in recent quarter. After it had experienced a contraction of 13,0 percents in 2005 and grew at 0,39 percents in 2006, Indonesia experienced annual growth of 5,56 percents and 6,23 percents in first and second quarter of 2006 respectively. From an aspect of offer the economic improvement had been recorded in all sectors but agricultural sector.

Several sector that had experienced a sufficiently high growth, among the others, were development, transportation and communication, fuel, electricity power, gas, and drinking water sectors and so on.

***Keywords:** price of fuel fossil, telephone tariff and basic tariff of electricity power*

PENDAHULUAN

Lambannya pemulihan ekonomi pada tahun 2005 membuat sebagian publik tetap merasa pesimis bahwa di tahun 2007 kondisi pertumbuhan ekonomi belum banyak bisa diharapkan. Hal ini bisa terlihat dari prediksi publik terhadap kondisi perekonomian di tahun mendatang. Sebagian responden menilai beberapa kondisi ekonomi yang tergolong buruk di tahun ini adalah kondisi harga barang dan jasa, nilai tukar rupiah dan ketersediaan lapangan kerja.

Penilaian negatif yang diungkapkan terhadap kondisi ekonomi bukan tanpa alasan, setidaknya ada tiga faktor yang mendasari sikap pesimis yaitu :

1. Bercermin dari sepanjang tahun 2005 meskipun roda ekonomi telah mulai bergerak dengan pertumbuhan sekitar 5,6 persen, ini dinilai masih sangat rapuh. Apalagi nilai tukar rupiah masih sering terjadi gejolak dan ditambah dengan tingkat inflasi kumulatif yang mencapai dua digit.
2. Melihat rencana kenaikan harga beberapa barang kebutuhan pokok yang tengah dibahas pemerintah saat ini seperti tarif telepon, tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM). Akibatnya mereka akan semakin berat untuk menghadapi tekanan harga barang dan jasa disemua sektor.
3. Kebijakan pemerintah dengan tujuan kenaikan harga barang dasar untuk menutup anggaran belanja yang sarat defisit yang berkelanjutan. Munculnya

suatu ide yang dilontarkan berdasarkan rapat sidang pleno memutuskan bahwa sekarang pemerintah untuk mengurangi subsidi pada sektor barang dan jasa yang menyebabkan kenaikan dari beberapa bahan bakar minyak, telepon dan tarif dasar listrik.

Dalam situasi seperti ini tidak heran apabila daya beli masyarakat akan terganggu dimasa mendatang. Kondisi seperti ini turut mendominasi pola pemikiran mereka dalam menyikapi situasi ekonomi di tahun ini. Ada pendapat lain bahwa perekonomian Indonesia pada tahun ini tidak akan mengalami kemajuan apabila dibandingkan dengan tahun lampau. Begitu pula dengan Indikator makro lain seperti tingkat inflasi yang diperkirakan tidak akan jauh berbeda atau bahkan sedikit bergeser cenderung ke atas yakni 11,5 persen, nilai tukar rupiah serta suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diperkirakan juga tidak akan lebih baik dari sebelumnya.

Tim ekonomi pemerintah selama kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir belum menunjukkan hasilnya. Bahkan sebenarnya tahun 2005 ditutup dengan indikator makro yang lebih buruk dari pada tahun 2004, selain itu tim ekonomi yang sekarang juga tidak lebih baik koordinasinya dalam penyelesaian masalah. Pemerintah juga dinilai tidak secara langsung menstabilkan moneter sehingga inflasi bisa terkendali dengan cepat ketika harga bahan bakar minyak, tarif telepon dan tarif dasar listrik dinaikan.

Apakah kenaikan harga bahan bakar minyak, telepon, dan tarif listrik berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi?

Secara makro tanda-tanda pemulihan ekonomi memang semakin nyata dalam beberapa kuartal terakhir. Setelah mengalami kontraksi 13,0 persen tahun 2004 dan tumbuh 0,4 persen tahun 2005, pada kuartal pertama dan kedua tahun 2005 ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 3,80 persen dan 4,23 persen. Dari sisi penawaran, peningkatan kegiatan ekonomi tercatat di semua sektor kecuali pertanian. Beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan tahunan cukup tinggi pada kuartal kedua tahun 2005 antara lain sektor bangunan (13,07 persen) pengangkutan dan komunikasi (11,51 persen), listrik, dan gas dan air minum (6,90 persen) industri pengolahan (5,83 persen) serta bank dan lembaga keuangan lainnya (5,68 persen) Peningkatan kegiatan ekonomi juga tercermin pada penjualan kendaraan bermotor, perdagangan ritel, konsumsi semen dan tingkat hunian properti komersial (Deputi Gubernur B I, 2005).

PEMBAHASAN

Dari ketiga landasan kajian teori di atas erat kaitannya dengan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah saat ini, yakni rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak, telepon, dan tarif dasar listrik. Dengan kebijakan ini ternyata akan sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan ekonomi, di Indonesia dan khususnya pada inflasi yang akan terjadi bila kebijakan ini benar-benar diterapkan. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak, tarif telepon, dan tarif dasar listrik serta juga berbagai pajak sosial lain bisa dikatakan sebagai

high risk policy, kebijakan yang memiliki risiko tinggi, akan adanya gejala dari masyarakat. Resistensi yang akan menurunkan nilai keabsahan dari kebijakan pemerintah tersebut. Kenaikan harga bahan bakar minyak, telepon, dan tarif dasar listrik serta pajak sosial lainnya.

Pada awal tahun 2006 merupakan strategi pemerintah untuk mengelola keseimbangan anggaran negara yang mengalami defisit beberapa tahun terakhir. Keseimbangan anggaran negara yang timpang karena 57,5 persen setiap tahunnya digunakan untuk membayar utang luar negeri yang saat ini sudah mencapai hampir kisaran 147 – 152 miliar dollar. Dalam logika pemerintah, pos-pos pengeluaran yang dianggap kontraproduktif seperti subsidi bahan bakar minyak, telepon, dan tarif listrik dasar perlu dihapuskan secara bertahap (Budiono, 2005).

Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak, telepon, dan tarif dasar listrik serta pajak sosial lain, sebagai konsekuensi penghapusan subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan poin kebijakan pemerintah berpaham *structural adjustment policy*, yang disepakati oleh pemerintah bersama International Monetary Fund (IMF) melalui tahun terakhir. Kebijakan pemerintah yang lain juga dipandang kontroversi dan kurang memihak nasib ekonomi rakyat antara lain: privatisasi perusahaan negara yang memicu ongkos sosial di masa depan, restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan yang menguras dan rakyat melalui lembaga Bank Indonesia dengan istilah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hampir kurang lebih 500 triliun rupiah (Maulana Ibrahim, 2005).

Kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif telepon, dan tarif dasar listrik serta pajak sosial itu sendiri dalam kalkulasi politis akan menimbulkan dampak inflatoir ekonomi dan akan memunculkan resistensi publik. Kenaikan harga bahan bakar minyak, telepon, dan lainnya akan berpengaruh maksimal terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat dan akan menimbulkan ketidakpastian standar harga di tingkat pasar. Efeknya pada jangka panjang akan meningkatkan skala kemiskinan absolut di kalangan masyarakat bawah khususnya sektor perburuhan, pertanian, dan informal kecil.

Bisa dibayangkan ketika kita melihat data statistik tentang pendapatan perkapita masyarakat yang rata-rata pertahunnya kurang dari Rp 135.000,00 akan semakin berkurang karena dipacu daya belinya hanya untuk menomboki kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif telepon, dan tarif dasar listrik sepanjang tahapan persentase kenaikannya (Toni Prasetyo, 2005).

Kebijakan kenaikan bahan bakar minyak, tarif telepon, dan tarif dasar listrik sendiri diteropong dari dimensi kebijakan publik, bisa digolongkan sebagai kebijakan negara yang menghilangkan batas legitimasi sosial masyarakat dan cenderung bertolak belakang dari aspirasi politik. Dampak politis yang akan muncul kemungkinan bisa dibedakan menjadi beberapa hal:

1. Semakin merosot kepercayaan publik terhadap kemampuan manajerial pemerintah dalam menanggulangi krisis ekonomi nasional, di mana dalam anggapan publik pemerintah sekarang ini setara dengan pemerintah dahulu

- yang tidak memiliki desain pembangunan ekonomi yang pro rakyat justru pro terhadap kepentingan asing dan kelompok elit yang bermodal.
2. Selanjutnya akan memicu gejolak sosial di tingkat masyarakat bawah yang merasakan dampak kenaikan harga barang kebutuhan pokok semakin meroket. Masyarakat bawah yang akan menanggung langsung dampak sosial dan mereka tidak juga memiliki ketahanan ekonomi yang kuat.
 3. Daya beli masyarakat bawah akan semakin turun dan mereka akan semakin mengalami proses kemiskinan kolektif. Demikian juga dalam sektor industri akan meningkatkan angka pengangguran karena biaya produksi yang semakin tinggi tidak memungkinkan industri berkembang dengan baik.

Untuk menanggulangi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif telepon, dan tarif dasar listrik, pemerintah ternyata hanya menyiapkan resolusi sosial berupa kompensasi dana masyarakat sebesar 4,8 triliun untuk dialokasikan pada biaya subsidi sektor pendidikan, kesehatan, kompensasi minyak tanah dengan kompor gas dan kredit mikro ekonomi. Namun sebuah catatan dana kompensasi kenaikan bahan bakar minyak, tarif telepon, dan listrik tersebut tidak sebanding dengan biaya total subsidi yang dicabut sebesar 32,6 triliun. Selanjutnya pemerintah tidak memiliki mekanisme struktur penyalur dana kompensasi kenaikan bahan bakar minyak dan telepon, listrik yang bebas dari unsur korupsi dan birokrasi (Toni Prasetyo, 2005).

Selain adanya publikasi mengenai kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah tersebut, ternyata pemerintah kurang memperhitungkan akibat langsung dari penyampaian informasi kebijakan tersebut. Di antaranya adalah kompensasi minyak dengan gas elpiji, menghilangnya BBM dari pasaran akibat ulah spekulan yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja dengan menimbun BBM tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tinggi ketika kenaikan harga BBM diberlakukan oleh pemerintah.

Sementara itu kalangan pengusaha menilai kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif telepon, dan tarif dasar listrik kontra produktif terhadap upaya pemerintah menekan angka pengangguran, karena tidak sedikit pengusaha yang akan merampingkan jumlah tenaga kerja akibat tingginya biaya produksi. Mereka menilai pemerintah belum layak menaikkan bahan bakar minyak di tengah melemahnya harga minyak internasional. Apalagi ditambah dengan kenaikan tarif dasar listrik setiap enam bulan rata-rata 3,9 persen yang semakin membebani dunia usaha. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah tidak hanya sekedar menaikkan harga bahan bakar minyak, telepon, dan tarif listrik, tetapi juga melakukan penghematan disegala bidang (Kompas, 2007).

Kalau dipandang dengan kacamata politis, kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak, telepon dan tarif dasar listrik memiliki alasan politis yaitu :

1. Sebagai langkah strategis untuk menutup kerugian biaya operasional PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) dan Pertamina yang gagal dalam melakukan kinerja yang efisien.

2. Sebagai langkah penghematan pos pengeluaran negara dan meningkatkan kemandirian rakyat secara ekonomi.
3. Merupakan metode ekonomi makro praktis untuk mengajukan mekanisme pasar dalam perekonomian domestik.

Alasan di atas sebenarnya hanya dalih politis pemerintah untuk mengelak atas ketidakmampuan mereka dalam menetapkan kebijakan ekonomi dan politik yang independen dari injeksi kepentingan agen kapitalisme internasional. Demikian juga dalih penghematan pos pengeluaran anggaran negara jelas merupakan penyimpangan politis semata-mata. Mengingat sesungguhnya selama tiga tahun terakhir pos pengeluaran negara sebesar 57,5 persen digunakan untuk mengembalikan utang luar negeri (Menteri Keuangan. R.I, Budiono).

Sedangkan dalih kenaikan harga bahan bakar minyak, telepon dan tarif dasar listrik untuk menutupi biaya oprasional PT PLN dan Pertamina (dari kerugian akibat ketidaksebandingan antara harga jual dan biaya operasional minyak, telepon dan listrik sebagai dampak harga jual produk minyak dunia). Berikutnya juga merupakan apologi politik semata mengingat kerugian PT PLN dan Pertamina, telepon selama periode akibatkan oleh faktor korupsi internal.

Dipandang dari sisi ekonomi kebijakan pemerintah menaikkan bahan bakar minyak, tarif telepon, dan tarif dasar listrik sendiri akan semakin memberatkan perekonomian rakyat, dengan kenaikan harga tersebut akan menciptakan beban ekonomi bagi masyarakat yang nantinya akan menciptakan persentase angka kemiskinan dan pengangguran yang relatif semakin banyak. Dari dampak yang mulanya dirasakan oleh rakyat kalangan bawah yakni menurunnya daya beli masyarakat, munculnya banyak pengangguran akibat banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh para pengusaha untuk menutup biaya operasional akan sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara Indonesia.

Dengan melemahnya daya beli masyarakat secara otomatis akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara Indonesia. Dari dampak lain yaitu hilangnya bahan bakar minyak akibat penimbunan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maupun oleh karena kebijakan organisasi (OPEC: *Organization of the Petroleum Exporting Countries*) di mana mereka sepakat untuk mengurangi produksi minyaknya, hal ini akan memicu timbulnya inflasi yang cukup tinggi khususnya di negara Indonesia sebagai penghasil minyak sekaligus anggota OPEC.

KESIMPULAN

Bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah mengenai kenaikan bahan bakar minyak, telepon, dan tarif dasar listrik dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut ternyata menimbulkan dampak yang sangat luas, di antaranya adalah menghilangkan barang-barang dimaksud dari peredaran pasar, meningkatnya jumlah pengangguran, serta melemahnya daya beli masyarakat.

Dengan timbulnya permasalahan tersebut maka akan sangat memicu meningkatnya inflasi di Indonesia di tahun mendatang di mana tahun 2005 telah

mencapai 13,4 persen hampir dikatakan 14 persen atau inflasi rata-rata satu persen dengan melemahnya daya beli masyarakat secara otomatis akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pemberlakuan harga bahan bakar minyak, telepon, dan tarif dasar listrik akan semakin memberatkan perekonomian rakyat, yang akan menciptakan beban ekonomi bagi masyarakat bawah khususnya kaum buruh dan kaum tani.

DAFTAR PUSTAKA

- Bcelius Ruru, *Arah Kebijakan BUMN Menghadapi Era WTO 2005 dan APEC 2020*.
- Boediono, 2000, *Ekonomi Internasional*, BPFE, Yogyakarta.
- Manajemen Usahawan 05/TH XXV Juni 1996.
- Goldfeld, S.M. 1996. *Ekonomi Uang dan Bank*. Penerbit, Erlangga, Jakarta.
- Hamzah, Haz 2000. *Kebijaksanaan Fiskal & Perbankan Ekonomi Moneter Baru*, Gressindo. Jakarta.
- M. Suparmoko, 1996 *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Keempat, BPFE, Yogyakarta.
- Nopirin,. 1996, *Ekonomi Moneter* Edisi 2, BPFE, Yogyakarta.
- Rizal Ramli. Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan : *Diskusi Masalah Ekonomi Indonesia*, Kompas 1 Maret 2008.
- Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia; *Diskusi Tentang Penyebab terjadinya Krisis Ekonomi Asia 1997-1999*, Media SINDO, 11 Maret 2008.
- Toni Prasetyo, *Diskusi Tentang Dampak Pembayaran Hutang Luar Negeri*. Kompas, 6 Januari 2007.